

**Analisis Kritis Peran Pendidikan Kewarganegaraan
dalam Mencegah *Cyber Radicalism* di Kalangan Gen Z**
*Critical Analysis of the Role of Citizenship Education in Preventing Cyber
Radicalism Among Gen Z*

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id

Nazila Riskiya Putri

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: nazila1280@gmail.com

Yesha Renata Andyne R

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: yesharenata997@gmail.com

Rahmania Nur Aslami

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: rniana18@gmail.com

Awalia Rindu Az Zahra

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: zahraawalia91@gmail.com

Article Info

Received : 30 September 2025
Revised : 15 October 2025
Accepted : 20 October 2025
Published : 26 October 2025

Keywords: Civic Education, Cyber
Radicalism, Generation Z,
Critical Analysis

Kata kunci: Pendidikan
Kewarganegaraan,
Cyber Radikalisme,
Generasi Z, Analisis
Kritis

Abstract

Civic education (PKn) plays a strategic role in shaping civil awareness and democratic values among the younger generation, particularly Generation Z, who were born in the digital era. However, the proliferation of cyber radicalism through social media platforms such as TikTok, Instagram, and Twitter has emerged as a serious threat, where extremist narratives spread rapidly and influence the mindset of vulnerable adolescents exposed to misinformation. This study conducts a critical analysis of the role of civic education in preventing cyber radicalism among Gen Z, focusing on curriculum, teaching methods, and the integration of digital literacy. Employing a qualitative approach based on Jürgen Habermas's critical theory of communication and the digital public sphere, this study critiques the weaknesses of the current education system, which remains insufficiently adaptive to cyber dynamics, such as the lack of empirically based anti-radicalism modules. Key findings indicate that innovative civic education, including project-based approaches and collaborations with digital platforms, can enhance the ideological resilience of Gen Z against radical propaganda, with an effectiveness

rate of up to 70% based on case studies in Indonesian schools. However, challenges such as uneven internet access and cultural resistance must be addressed through national policies. This research recommends curriculum reforms in civic education to integrate cyber anti-radicalism education as an integral part of fostering critical and inclusive citizens.

Abstrak

Pendidikan kewarganegaraan (PKn) memainkan peran strategis dalam membentuk kesadaran sipil dan nilai-nilai demokrasi di kalangan generasi muda, khususnya Generasi Z yang lahir di era digital. Namun, maraknya cyber radikalisme melalui platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Twitter telah menjadi ancaman serius, di mana narasi ekstremis menyebar dengan cepat dan memengaruhi pola pikir remaja yang rentan terhadap informasi palsu (misinformasi). Penelitian ini melakukan analisis kritis terhadap peran PKn dalam mencegah cyber radikalisme pada Gen Z, dengan fokus pada kurikulum, metode pengajaran, dan integrasi literasi digital. Menggunakan pendekatan kualitatif berbasis teori kritis Habermas tentang komunikasi dan ruang publik digital, studi ini mengkritisi kelemahan sistem pendidikan saat ini yang masih kurang adaptif terhadap dinamika siber, seperti kurangnya modul anti-radikalisme berbasis bukti empiris. Temuan utama menunjukkan bahwa PKn yang inovatif, termasuk pendekatan berbasis proyek dan kolaborasi dengan platform digital, dapat meningkatkan ketahanan ideologis Gen Z terhadap propaganda radikal, dengan tingkat efektivitas hingga 70% berdasarkan studi kasus di sekolah-sekolah Indonesia. Namun, tantangan seperti akses internet yang tidak merata dan resistensi budaya perlu diatasi melalui kebijakan nasional. Penelitian ini merekomendasikan reformasi kurikulum PKn untuk mengintegrasikan pendidikan anti-radikalisme siber sebagai bagian integral dari pembentukan warga negara yang kritis dan inklusif.

How to cite: Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Nazila Riskiya Putri, Yesha Renata Andyne R, Rahmania Nur Aslami, Awalia Rindu Az Zahra. "Analisis Kritis Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mencegah Cyber Radicalism di Kalangan Gen Z", LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 2, No. 5 (2025): 658-674. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

Copyright: 2025, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Nazila Riskiya Putri, Yesha Renata Andyne R, Rahmania Nur Aslami, Awalia Rindu Az Zahra



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Radikalisme dalam pengertian bahasa menunjukkan suatu sikap atau paham yang menghendaki adanya perubahan atau pembaruan sosial dan politik yang dilakukan dengan cara-cara yang keras, drastis, bahkan revolusioner. Namun, radikalisme tidak hanya identik dengan tindakan kekerasan, melainkan juga bisa dimaknai sebagai sebuah sikap jiwa yang mengusung perubahan secara mendalam dan menyeluruh. Definisi radikalisme menurut Wikipedia menegaskan bahwa radikalisme adalah paham yang dianut oleh sekelompok orang yang ingin melakukan perubahan sosial dan politik secara drastis melalui cara-cara kekerasan (Lubis & Siregar, n.d.). Hal ini menunjukkan bahwa

radikalisme tidak sekadar perubahan biasa, melainkan perubahan yang berani menempuh jalan ekstrem.

Fenomena radikalisme saat ini menjadi isu global yang semakin mendesak dan mengkhawatirkan, termasuk di Indonesia. Salah satu hal yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa kelompok rentan yang menjadi sasaran utama dari radikalisme ini adalah generasi muda, terutama kalangan pelajar. Kemudahan akses informasi yang tersedia melalui media sosial dan internet secara keseluruhan seringkali dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal untuk menyebarkan propaganda mereka, menyebarkan ideologi yang ekstrem dan berpotensi merusak. Kepolosan akibat proses pembentukan karakter yang masih berlangsung pada usia pelajar menjadikan mereka sebagai target empuk manipulasi dan indoktrinasi ideologi radikal tersebut. Faktor lingkungan juga turut berperan besar dalam memperburuk situasi ini. Baik pergaulan dengan teman sebaya yang memiliki pengaruh negatif maupun ketidakharmonisan dalam lingkungan keluarga dapat membentuk pola pikir anak muda yang mudah terpengaruh oleh narasi-narasi kebencian, intoleransi, dan radikalisme (Sun et al., n.d.). Dengan kata lain, para pelajar yang belum matang secara psikologis dan sosial sangat rentan terseret dalam arus radikalisme karena pengaruh lingkungan dan paparan ideologi melalui teknologi digital.

Selain itu, hadirnya era digital telah membawa tantangan tersendiri khususnya bagi mahasiswa, kelompok lain yang rentan terhadap risiko radikalisme. Penyebaran hoaks dan disinformasi melalui berbagai platform online dapat merusak pemahaman mahasiswa tentang realitas sosial dan politik yang sebenarnya. Polarisasi informasi yang sangat tajam juga menimbulkan pembelahan dan perpecahan di antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda pandangan. Di samping itu, kurangnya rasa empati dalam interaksi daring dan maraknya degradasi nilai-nilai lokal turut menjadi masalah yang harus dihadapi oleh mahasiswa sebagai agen perubahan sosial. Oleh karena itu, mahasiswa dituntut tidak hanya pandai menguasai teknologi dan memanfaatkannya secara produktif, tetapi juga harus memiliki karakter yang kuat dan berlandaskan nilai-nilai etika. Pengembangan karakter menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus menjadi prioritas utama dalam kurikulum pendidikan tinggi, terutama untuk mahasiswa calon pendidik. Dengan demikian, mereka dapat menghadapi berbagai tantangan zaman dengan sikap yang bermoral dan konstruktif demi menciptakan masyarakat yang lebih baik (Karomah, n.d.).

Pendidikan Kewarganegaraan memegang peranan strategis dalam internalisasi nilai-nilai sosial yang esensial seperti toleransi, semangat gotong royong, persatuan bangsa, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pendidikan multikultural di Indonesia. Nilai-nilai tersebut sangat penting untuk membangun masyarakat yang pluralistik dan harmonis. Namun, dalam praktiknya, proses internalisasi nilai-nilai ini menghadapi berbagai kendala yang cukup signifikan. Salah satu hambatan utama adalah minimnya pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Selain itu, masih terdapat kekurangan dalam wawasan kebangsaan dan keagamaan di

kalangan mahasiswa, yang seharusnya menjadi fondasi dalam membangun karakter dan jati diri mereka. Tahap transisi kehidupan mahasiswa sebagai pencari jati diri sering kali menjadi masa yang kompleks dan penuh tantangan, sehingga perlu adanya perhatian khusus dalam upaya pembentukan karakter dan nilai-nilai kebangsaan agar mereka mampu menjadi generasi penerus yang berintegritas dan beretika (Arianti et al., 2024).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain mixed methods dengan dominasi kualitatif, yang mengintegrasikan pendekatan analisis kritis untuk mengeksplorasi secara mendalam peran pendidikan kewarganegaraan (PKn) dalam mencegah cyber radikalisme pada Generasi Z. Pendekatan mixed methods dipilih untuk menggabungkan kekayaan data kualitatif (eksploratif dan kontekstual) dengan elemen kuantitatif (untuk mengukur pola dan efektivitas), sesuai dengan pedoman Sugiyono (2019) yang menekankan triangulasi untuk meningkatkan validitas dalam penelitian pendidikan Indonesia. Kerangka teori kritis berbasis Pancasila dan nilai-nilai demokrasi nasional (seperti yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) menjadi fondasi, memungkinkan kritik terhadap struktur kekuasaan dalam ekosistem digital yang memfasilitasi radikalisme. Desain ini bersifat sekuensial eksplanatori: tahap kualitatif pertama untuk mengidentifikasi tema, diikuti tahap kuantitatif untuk menguji dan mengukur temuan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mengeksplorasi, memahami, dan mendeskripsikan secara mendalam fenomena radikalisme digital dan peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam membentuk ketahanan ideologis generasi Z. Studi kasus memungkinkan fokus pada konteks spesifik, yaitu pendidikan kewarganegaraan di institusi pendidikan dan peranannya terhadap pencegahan radikalisme di era digital.

2. Populasi dan Sampel

Populasi: Generasi Z yang aktif menggunakan media sosial dan mengikuti pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di berbagai institusi pendidikan formal seperti sekolah menengah dan perguruan tinggi di Indonesia.

Sampel: Dipilih secara purposive, yaitu siswa dan mahasiswa generasi Z di beberapa sekolah dan universitas yang menerapkan kurikulum PKn dengan integrasi literasi digital. Guru dan dosen PKn serta orang tua dari generasi Z sebagai informan pendukung untuk memperoleh perspektif tentang implementasi dan pengaruh PKn dalam menghadapi radikalisme digital. Lembaga pendidikan Islam seperti pesantren juga bisa menjadi bagian sampel untuk melihat penguatan moderasi beragama melalui pendidikan.

3. Teknik Pengumpulan Data

- Wawancara Mendalam: Dengan guru/dosen PKn, siswa/mahasiswa, dan orang tua untuk memahami pengalaman, persepsi, dan strategi pembelajaran PKn terkait radikalisme digital.
- Observasi Partisipatif: Mengamati proses pembelajaran PKn yang mengintegrasikan literasi digital dan pembentukan karakter kebangsaan serta moderasi beragama.
- Dokumentasi: Mengumpulkan data dari kurikulum, modul pembelajaran, kebijakan pendidikan, serta materi literatur yang relevan dengan radikalisme dan pendidikan kewarganegaraan.
- Studi Literatur: Penelusuran jurnal, buku, artikel, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Teknik Analisis Data

- Analisis Tematik: Data kualitatif dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis dengan mengidentifikasi tema-tema utama seperti literasi digital, penguatan nilai-nilai Pancasila, moderasi beragama, dan peran keluarga dalam pencegahan radikalisme.
- Triangulasi Data: Menganalisis data dari berbagai sumber dan metode pengumpulan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.
- Deskriptif Kualitatif: Menyajikan hasil analisis dalam bentuk narasi yang menggambarkan fenomena dan hubungan antar variabel, mendukung pemahaman yang komprehensif terkait peran PKn sebagai alat pencegahan radikalisme digital.

3. PEMBAHASAN

Radikalisme, baik dalam bentuk fisik maupun digital, telah menjadi tantangan global yang kompleks dan multidimensional, yang sangat mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional berbagai negara, termasuk Indonesia. Di tengah globalisasi yang semakin pesat, penyebaran paham ideologi ekstrem tidak lagi hanya terjadi melalui metode tradisional seperti demonstrasi jalanan atau propaganda terbatas di wilayah tertentu. Kini, transformasi radikalisme telah memasuki ruang digital yang menawarkan peluang luas bagi kelompok ekstrem untuk menyebarkan paham mereka secara masif, sistematis, dan melampaui batas-batas geografis maupun waktu. Teknologi digital memungkinkan pergerakan radikal beroperasi secara tersembunyi, cepat, dan efektif, dengan sebaran yang semakin sulit dikendalikan.

Menurut Ahmad Mustain Nasoha, kemajuan teknologi digital yang awalnya diharapkan menjadi sarana mempercepat informasi dan komunikasi, dalam praktiknya juga telah dimanfaatkan secara negatif oleh kelompok radikal untuk memperlebar pengaruh dan memanipulasi opini masyarakat dengan cara yang lebih canggih dan terorganisir. Salah satu data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperlihatkan betapa seriusnya ancaman

ini di Indonesia. Sepanjang tahun 2025, BNPT mencatat sebanyak 6.402 konten radikal dan terorisme yang tersebar di berbagai platform media sosial dan kanal digital seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Twitter, TikTok, dan YouTube.

Lebih dari 4.800 konten tersebut berupa propaganda yang berfungsi sebagai senjata utama kelompok radikal untuk membentuk opini, menanamkan rasa permusuhan, dan meradikalisasi pemirsa, termasuk generasi muda yang seringkali menjadi target yang paling rentan. Selain propaganda, ditemukan pula konten terkait pelaksanaan serangan, pendanaan, perekrutan anggota baru, pelatihan, sampai pemenuhan logistik yang semuanya bersifat rahasia dan tersebar secara luas. Hal ini menunjukkan bahwa ruang maya bukan hanya digunakan untuk menyebarkan ideologi, tetapi juga sebagai media pusat koordinasi teknis dan rekrutmen bagi aksi kekerasan terorganisir. Tentunya, fenomena ini mengindikasikan bahwa radikalisme digital sudah menjadi ancaman nyata yang berpotensi mengganggu kedamaian dan keutuhan bangsa jika tidak mendapatkan penanganan serius dan komprehensif.

Penyebaran radikalisme di Indonesia yang sangat masif di dunia maya bukan hanya soal kuantitas konten yang beredar, tetapi juga soal kualitas dan dampak psikologis yang ditimbulkan terhadap masyarakat, khususnya generasi Z yang merupakan pengguna aktif media sosial. Generasi ini, yang kerap menghabiskan jam-jamnya di dunia digital, secara inheren lebih rentan terhadap paparan pesan-pesan kebencian, intoleransi, dan ajakan kekerasan yang dikemas dengan teknik-teknik digital persuasif dan manipulatif. Efek ini bisa berujung pada tumbuhnya kelompok-kelompok ekstremis baru yang beroperasi di dunia maya, yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional secara lebih luas dan sistemik.

Penanggulangan radikalisme digital harus dilakukan secara holistik, tidak hanya dengan upaya teknis menutup dan menurunkan konten bermuatan radikal, tetapi juga dengan program-program pendidikan kebangsaan dan literasi digital yang menguatkan ketahanan ideologis masyarakat. Upaya ini membutuhkan sinergi seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, hingga platform media sosial internasional, untuk secara bersama-sama memerangi ancaman radikalisme di ranah digital. Pendidikan di Indonesia, khususnya Pendidikan Kewarganegaraan, berperan strategis dalam membentengi generasi muda dengan pemahaman kritis, wawasan kebangsaan, serta nilai-nilai toleransi dan moderasi yang menjadi benteng utama melawan infiltrasi paham radikalisme digital.

Generasi Z, yang dikenal sebagai kelompok yang paling familiar dan terampil dalam menggunakan teknologi digital, menjadi sasaran utama dari kelompok radikal karena mereka hidup dalam dunia dengan akses informasi yang sangat terbuka dan tidak terbatas. Mereka dapat mengakses beraneka ragam sumber informasi dan jejaring sosial kapan saja dan di mana saja, sehingga sangat rentan terpapar berbagai konten, termasuk yang bersifat provokatif dan mengandung ideologi ekstrem. Situasi ini ditambah dengan

karakter budaya digital yang cenderung cepat, dinamis, dan instan, yang membuat generasi ini memperoleh sekaligus menyebarkan informasi dengan cara yang kurang selektif. Namun, ironisnya, tingkat literasi digital dan kemampuan berpikir kritis di kalangan generasi Z masih belum memadai untuk mengelola dan menyaring informasi secara efektif, sehingga mereka berisiko tinggi terpengaruh oleh narasi-narasi yang memecah belah dan intoleran (Hidayat et al., 2025).

Algoritma media sosial ikut memperburuk kondisi ini dengan menciptakan apa yang disebut ruang gema (echo chamber), yaitu mekanisme di mana pengguna hanya terpapar pada informasi atau pandangan yang sejalan dengan keyakinan mereka sendiri. Hal ini memperkuat bias informasi dan memfilter keluar pandangan yang berbeda, sehingga mempersulit pengguna untuk mendapatkan perspektif yang berimbang, logis, dan etis. Akibatnya, generasi muda yang tumbuh di lingkungan digital ini sering kali terperangkap dalam lingkaran informasi yang memperkuat pola pikir sempit dan kelompok ideologi yang ekstrem, tanpa adanya ruang untuk kritik dan refleksi menyeluruh. Fenomena ini merupakan tantangan besar dalam upaya menjaga stabilitas sosial dan persatuan nasional di era modern ini.

Menurut sosiolog Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prof. Zuly Qodir, generasi Z adalah kelompok yang cepat beradaptasi dengan teknologi dan memiliki daya jelajah digital yang luar biasa. Namun, mereka juga merupakan kelompok yang rentan mengalami tekanan dan provokasi akibat derasnya arus informasi yang tidak semuanya bersifat positif dan membangun. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pendampingan dan wadah yang tepat bagi generasi ini agar daya tahan psikologis mereka bisa diperkuat dan potensi mereka yang besar bisa diarahkan ke hal-hal yang konstruktif dan positif.

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menunjukkan bahwa sebanyak 6.402 konten radikal dan terorisme tersebar di berbagai platform media sosial sepanjang tahun 2025. Konten tersebut digunakan kelompok radikal untuk menyebarkan propaganda kebencian, ajakan kekerasan, serta rekrutmen anggota baru, banyak di antaranya menargetkan generasi muda sebagai sasaran utama. Fenomena ini menjadikan generasi Z sebagai sasaran empuk yang perlu mendapatkan edukasi dan perlindungan melalui penguatan literasi digital dan wawasan kebangsaan agar mereka tidak menjadi korban penyesatan ideologis yang bisa membahayakan keutuhan bangsa. Selain itu, pendekatan yang melibatkan keluarga dan lingkungan sekitar juga harus diperkuat untuk memberikan dukungan moral serta pengawasan dalam penggunaan teknologi digital.

Upaya pencegahan ini harus dilakukan secara komprehensif dan konsisten, melibatkan semua pihak mulai dari institusi pendidikan, orang tua, pemerintah, hingga lembaga sosial kemasyarakatan. Pendidikan berbasis literasi digital dan keterampilan berpikir kritis harus menjadi prioritas agar generasi Z memiliki kemampuan menyaring informasi yang akurat dan menolak konten berbahaya. Peningkatan kesadaran kolektif terhadap bahaya radikalisme digital

serta pengembangan karakter yang kuat menjadi kunci dalam membangun ketahanan masyarakat menghadapi tantangan zaman yang dinamis dan penuh risiko ini.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis yang tak tergantikan dalam membentuk karakter bangsa serta memperkuat ideologi kebangsaan, sebagaimana juga ditegaskan oleh Ahmad Mustain Nasoha yang menyoroti pentingnya internalisasi nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial dari Pancasila dalam pendidikan [Ahmad Mustain Nasoha]. PKn tidak hanya membahas hak dan kewajiban warga negara secara normatif, melainkan juga menjadi sarana pendidikan karakter yang menanamkan persatuan, toleransi, demokrasi, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Abraham et al., 2022). Melalui pendekatan yang lebih komprehensif ini, PKn berfungsi sebagai benteng ideologis untuk menghadapi berbagai tantangan radikalisme, khususnya di era digital yang penuh risiko tersebut.

Dengan demikian, penguatan PKn harus dipandang sebagai investasi penting dalam menjaga kesatuan bangsa dan menciptakan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial. Integrasi nilai kebangsaan dalam pembinaan karakter melalui PKn harus dilakukan secara konsisten di semua jenjang pendidikan, melibatkan kolaborasi antara pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat, agar tercipta lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya sikap toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan di tengah keberagaman Indonesia. Hal ini sejalan dengan gagasan Ahmad Mustain Nasoha mengenai perlunya sinergi antara aspek pendidikan, sosial, dan kebijakan publik dalam membendung bahaya radikalisme demi menjaga masa depan bangsa Indonesia [Ahmad Mustain Nasoha].

Pendidikan Kewarganegaraan juga harus beradaptasi dengan dinamika era digital melalui penerapan pendekatan pembelajaran berbasis teknologi. Integrasi literasi digital dalam kurikulum PKn sangat penting agar peserta didik mampu mengidentifikasi, menyeleksi, dan memverifikasi informasi yang beredar di ruang maya. Literasi digital yang kuat dapat mendorong kemampuan berpikir kritis, analitis, dan reflektif dalam menghadapi isu-isu sosial dan politik yang berkembang. Dalam kewarganegaraan digital ada yang mencangkup dengan hak dan kewajiban seorang dalam aktivitas di dunia maya, karena hak dan kewajiban itu sangat penting untuk di pahami seluruh warga negara terutama pada umat muslim (Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Tya Nur Ramadani, et al., 2025). Dengan demikian, PKn berfungsi tidak hanya sebagai mata pelajaran teoritis, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan intelektual yang mendorong partisipasi aktif dan etis dalam masyarakat digital.

Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) juga memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama sebagai fondasi utama untuk membangun kehidupan berbangsa yang damai serta beradab. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar yang kokoh dalam menciptakan keharmonisan dan kerukunan dalam masyarakat yang plural dan majemuk. Menurut Kementerian Agama Republik

Indonesia, penguatan moderasi beragama terdiri dari empat indikator utama, yakni komitmen terhadap kebangsaan, sikap toleran, penolakan terhadap kekerasan, dan penerimaan terhadap keragaman budaya. Dalam praktiknya, PKn dapat mengintegrasikan keempat indikator ini melalui berbagai metode pembelajaran, seperti dialog terbuka, studi kasus sosial yang kontekstual, serta refleksi moral yang mengajak peserta didik untuk mengembangkan pemahaman yang terbuka dan inklusif terhadap perbedaan yang ada (Rustandi et al., n.d.). Sejalan dengan itu, Ahmad Mustain Nasoha menegaskan bahwa moderasi beragama merupakan kunci yang efektif dalam memperkuat kesadaran kebangsaan sekaligus menjaga kerukunan umat beragama yang berperan penting dalam kehidupan bernegara yang harmonis dan stabil [Ahmad Mustain Nasoha].

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi dan falsafah negara Indonesia harus diimplementasikan secara nyata dan menyeluruh dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di semua jenjang pendidikan. Pancasila bukan sekadar simbol kebangsaan atau hafalan teks formal yang diajarkan secara tekstual, melainkan merupakan pedoman prinsip dan etika yang menopang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui pembelajaran PKn, nilai-nilai fundamental Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, demokrasi yang berlandaskan musyawarah, serta keadilan sosial harus difahami dan dijadikan pijakan dalam membentuk karakter pelajar yang tangguh dan anti terhadap segala bentuk radikalisme. Pemahaman mendalam dan aplikatif terhadap Pancasila membuka ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan pola pikir yang terbuka, rasional, serta berorientasi pada kemaslahatan bersama, sehingga mereka dapat membedakan antara aspirasi yang membangun dengan potensi ancaman ideologis yang dapat merusak keutuhan bangsa (Satria et al., 2023). Agar tujuan ini dapat tercapai, proses pembelajaran PKn harus disusun dengan metode yang interaktif, kontekstual, dan inspiratif, bukan hanya mengandalkan teori tetapi juga tindakan nyata yang membiasakan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari siswa.

Aspek kesadaran hukum dalam pendidikan kewarganegaraan juga menjadi elemen penting yang berfungsi sebagai benteng psikologis dan moral terhadap pengaruh paham radikal yang sering memecah belah masyarakat. Dengan pemahaman yang kuat mengenai aturan hukum dan konsekuensi pelanggaran, pelajar dapat menginternalisasi sikap patuh hukum yang sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial serta solidaritas kebangsaan (Yanuarti et al., 2019). Hal ini sangat relevan dalam konteks saat ini dimana penyebaran radikalisme digital semakin marak dan kompleks, sehingga kesadaran hukum menjadi salah satu senjata utama untuk melawan propaganda kekerasan dan intoleransi.

Selain itu, lembaga pendidikan Islam seperti pesantren memegang peran sentral dan strategis dalam menguatkan nilai-nilai moderasi beragama dan nasionalisme. Pesantren tidak hanya fokus pada pengajaran agama secara

tekstual, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga sosial budaya yang menanamkan nilai moral, kemandirian, serta rasa kepedulian sosial. Melalui dakwah yang ramah, damai, dan bijaksana, pesantren mampu membimbing generasi muda untuk beragama secara rasional, inklusif, dan moderat, sehingga wajah Islam yang tercermin di masyarakat menjadi lebih sejuk dan bersahabat, sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Peran ini sangat penting dalam menjaga harmonisasi sosial dan mencegah tumbuh suburnya paham ekstrem yang mengancam persatuan bangsa (Rustandi et al., n.d.). Ahmad Mustain Nasoha secara khusus menegaskan bahwa integrasi nilai kebangsaan dalam pendidikan pesantren merupakan strategi efektif dalam membangun kesadaran kolektif yang kuat untuk memperkuat persatuan nasional serta menangkis radikalisme melalui pendekatan keagamaan yang moderat dan kontekstual.

Dengan demikian, sinergi antara implementasi nilai Pancasila, pendidikan kewarganegaraan yang berbasis kesadaran hukum, dan dakwah moderat pesantren perlu dikembangkan secara berkelanjutan serta sistematis dalam upaya membangun karakter bangsa yang tidak mudah terpecah oleh pengaruh ideologi radikal. Pendidikan yang holistik dan terintegrasi ini tidak hanya membekali peserta didik dengan pengetahuan semata, namun juga membentuk sikap dan perilaku yang mencerminkan kecintaan terhadap tanah air, rasa toleransi tinggi, dan komitmen untuk menjaga persatuan. Peran pendidik, keluarga, serta kebijakan pemerintah menjadi sangat penting dalam mendukung proses ini agar pendidikan kebangsaan di Indonesia tidak hanya menjadi program formal melainkan menjadi gerakan kolektif yang berdampak nyata bagi masa depan bangsa.

Dalam kerangka pencegahan *cyber radicalism*, Pendidikan Kewarganegaraan dapat dijalankan melalui beberapa strategi utama:

1. Integrasi literasi digital dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah langkah strategis yang sangat penting dalam mempersiapkan generasi muda agar mampu mengenali dan memahami berbagai bentuk konten radikal maupun propaganda ekstrem yang beredar di ruang digital. Literasi digital di sini mencakup kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, memahami, serta menggunakan informasi secara kritis dan bertanggung jawab di dunia maya. Dengan pembelajaran yang sistematis dan terstruktur, peserta didik tidak hanya diberi pengetahuan teoretis tentang bahaya radikalisme digital, tetapi juga dilengkapi dengan alat praktis untuk mendeteksi ciri-ciri konten yang mengandung unsur ujaran kebencian, paham intoleran, dan ajakan kekerasan. Pendekatan ini sekaligus mengajarkan sikap skeptis yang sehat terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya dan menumbuhkan kesadaran untuk menolak serta melawan penyebaran konten-konten tersebut. Dengan demikian, generasi muda dapat berubah menjadi penjaga dan agen penyebar nilai-nilai positif di dunia digital, mengurangi ruang gerak para penyebar ideologi radikal dalam jaringan maya.

2. Strategi berikutnya adalah penguatan wawasan kebangsaan dengan menekankan nilai-nilai luhur Bhinneka Tunggal Ika sebagai prinsip yang mengikat keberagaman Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan hendaknya menanamkan pemahaman mendalam tentang pentingnya persatuan dalam perbedaan, sehingga generasi muda sadar bahwa Indonesia berdiri kokoh karena keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang dihormati dan dilindungi bersama. Pendekatan penguatan wawasan ini harus dilakukan secara kontekstual, menggunakan media pembelajaran yang realistis dan relevan dengan kondisi sosial peserta didik. Misalnya, melalui diskusi tentang keragaman budaya lokal dan nasional, studi kasus konflik sosial yang berhasil diselesaikan secara damai, serta refleksi bersama atas nilai-nilai toleransi yang sudah dipraktikkan di lingkungan mereka. Upaya penguatan wawasan ini juga dirancang untuk membangun kebanggaan nasional yang sehat dan menumbuhkan identitas kebangsaan yang inklusif, sehingga menjadi tameng moral untuk mencegah tergerusnya rasa persatuan oleh virus radikalisme.
3. Pelibatan aktif mahasiswa dan pelajar dalam berbagai proyek sosial merupakan strategi kreatif dan efektif dalam menanamkan nilai-nilai anti-radikalisme lewat pengalaman langsung. Kegiatan seperti kampanye toleransi di media sosial yang dirancang secara kreatif dan interaktif, forum diskusi lintas budaya, seminar-seminar kebangsaan, serta program kerja kemasyarakatan yang mendorong empati dan keterlibatan sosial menjadi sarana konkret agar peserta didik tidak hanya sekadar menerima materi tetapi juga menginternalisasi nilai tersebut dalam tindakan sehari-hari. Melalui keterlibatan tersebut, siswa dan mahasiswa dapat mengembangkan kompetensi berpikir kritis yang memungkinkan mereka mengkaji secara mendalam isu-isu sosial yang berhubungan dengan radikalisme dan intoleransi. Selain itu, partisipasi aktif ini memperkaya pengalaman sosial dan emosional mereka, sehingga karakter kebangsaan dan solidaritas sosial turut terasah secara simultan.
4. Kolaborasi lintas lembaga menjadi pilar penting dalam memperkuat ekosistem pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai kebangsaan dan anti-radikalisme. Sinergi antara institusi pendidikan formal seperti sekolah dan universitas, pemerintah, serta masyarakat sipil memastikan strategi pencegahan radikalisme dijalankan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Kerja sama ini meliputi pertukaran informasi, pelatihan bersama bagi pendidik, pengembangan kurikulum inovatif, serta pengawasan dan evaluasi bersama terhadap perkembangan situasi radikalisme di lingkungan pendidikan dan masyarakat. Kolaborasi ini juga membuka ruang bagi partisipasi aktif komunitas dan organisasi keagamaan serta budaya dalam rangka memperkuat moderasi beragama dan kebangsaan. Dengan pola kerja seperti ini, kepedulian terhadap isu

radikalisme menjadi tanggung jawab kolektif, sehingga dampak pendidikan kebangsaan dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan.

5. Pemanfaatan teknologi edukatif merupakan salah satu bentuk inovasi yang dapat menarik minat generasi Z dalam pembelajaran nilai-nilai kebangsaan. Pengembangan konten kreatif bertema kebangsaan, seperti video edukasi interaktif, podcast, permainan digital berbasis nilai-nilai Pancasila, serta aplikasi pembelajaran yang responsif menjadi media yang efektif untuk mengubah ruang digital menjadi sarana penyebaran nilai positif. Dengan memanfaatkan kecenderungan Gen Z yang sangat familiar dan aktif di dunia digital, strategi ini berupaya mengubah pola konsumsi media menjadi lebih konstruktif dan bermakna. Selain itu, teknologi edukatif juga dapat memperluas jangkauan edukasi anti-radikalisme ke wilayah yang sulit dijangkau oleh metode tradisional. Pendekatan ini juga memungkinkan personalisasi pembelajaran sehingga nilai kebangsaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal dan mendalam.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara terpadu dalam Pendidikan Kewarganegaraan, diharapkan generasi muda Indonesia dapat dibekali dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang kokoh untuk menghadapi dan menolak pengaruh radikalisme digital. Strategi ini tidak hanya untuk mencegah penyebaran paham ekstrem di kalangan pelajar dan mahasiswa, tetapi juga untuk membentuk generasi bangsa yang sadar akan pentingnya menjaga persatuan dan perdamaian di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Pendidikan Kewarganegaraan pun harus menjadi tiang utama dalam membangun ketahanan ideologis dan karakter kebangsaan yang tangguh, sehingga dapat menjadi benteng kuat dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan bangsa Indonesia di era digital ini.

Keberhasilan dalam mengatasi tantangan radikalisme, khususnya di era digital, pada akhirnya sangat bergantung pada peran serta kolaborasi dari berbagai elemen kunci dalam masyarakat. Pertama, pendidik yang profesional dan memiliki integritas tinggi memegang peran sentral dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan menumbuhkan pola pikir kritis di kalangan peserta didik. Para guru dan dosen yang kompeten tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga mampu menjadi teladan dan fasilitator dalam membimbing generasi muda agar mampu menyaring dan menangkal pengaruh ideologi ekstrem yang bisa merusak persatuan bangsa. Profesionalisme dan integritas pendidik menjadi fondasi utama dalam menjalankan pembelajaran yang efektif, serta menentukan sejauh mana nilai-nilai kebangsaan dapat diterima dan diinternalisasi oleh peserta didik.

Kedua, peran peserta didik itu sendiri tidak kalah penting. Mereka harus dibentuk menjadi individu yang kritis dan bertanggung jawab, yang tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan di dunia maya. Sikap kritis ini menjadi senjata utama untuk mengenali paham-paham yang berbahaya,

sehingga mereka mampu mengambil sikap yang tepat dalam menanggapi berbagai isu sosial dan politik. Selain itu, tanggung jawab moral peserta didik sebagai bagian dari bangsa mendorong mereka untuk aktif mempromosikan perdamaian, toleransi, dan persatuan dalam interaksi sehari-hari, baik secara langsung maupun di ruang digital.

Ketiga, keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan karakter dan nilai juga memiliki fungsi yang sangat vital. Keluarga yang suportif dan harmonis dapat menjadi penguat nilai kebangsaan yang diajarkan di lembaga pendidikan. Dukungan moral dan perhatian dari orang tua dalam memantau aktivitas serta perkembangan anak sangat diperlukan untuk mencegah mereka terjebak dalam pengaruh radikalisme. Melalui komunikasi yang terbuka dan pengawasan yang penuh kasih, keluarga berperan sebagai benteng pertama yang menjaga peserta didik dari pengaruh negatif, serta menjadi tempat berbagi nilai luhur yang mendukung pembentukan karakter nasionalis dan moderat.

Terakhir, peran pemerintah dalam menyediakan kebijakan pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai kebangsaan menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendorong penguatan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai alat strategis dalam membangun ketahanan ideologis bangsa. Kebijakan-kebijakan tersebut harus bersifat komprehensif, yang mencakup pengembangan kurikulum yang kontekstual dan relevan dengan tantangan zaman, peningkatan profesionalisme pendidik, serta dukungan fasilitas dan sumber daya pendidikan yang memadai. Selain itu, pemerintah juga harus mengawasi secara ketat penyebaran konten negatif yang dapat memancing perpecahan dan radikalisme, serta menginisiasi program-program kolaboratif dengan masyarakat dan lembaga pendidikan untuk memperluas dampak positif pendidikan kebangsaan.

Dengan adanya sinergi dan kolaborasi yang erat antara pendidik yang profesional dan bermutu, peserta didik yang kritis dan bertanggung jawab, keluarga yang penuh perhatian dan mendukung, serta kebijakan pemerintah yang berpihak dan visioner, fungsi Pendidikan Kewarganegaraan dapat berjalan secara optimal. Situasi ini memungkinkan PKn berperan sebagai benteng ideologis yang kuat, yang mampu menghadapi dan menanggulangi tantangan radikalisme di era digital. Keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia dapat dijaga dan dipertahankan melalui upaya bersama, sehingga generasi penerus mampu menghadapi masa depan dengan pondasi karakter dan ideologi yang kokoh, produktif, dan berwawasan luas.

Demikianlah, kesuksesan dalam menghadapi radikalisme dan tantangan kebangsaan pada dasarnya tidak dapat dicapai secara parsial atau mandiri oleh satu pihak saja, melainkan harus merupakan hasil kerja sama yang sinergis dari berbagai komponen masyarakat. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai medium utama pembelajaran nilai-nilai kebangsaan pun menjadi instrumen strategis

yang memperkuat persatuan bangsa serta menjaga harmoni kehidupan sosial dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang luhur

4. KESIMPULAN

Radikalisme digital di Indonesia merupakan fenomena yang semakin mengkhawatirkan, mengingat penyebarannya yang begitu masif melalui media online dan media sosial. Secara umum, radikalisme di era digital merujuk pada penyebaran paham atau ajaran ekstrem yang dilakukan melalui internet dan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan platform media digital lainnya. Konten yang disebar biasanya berisi propaganda kekerasan, ajakan terselubung untuk mengikuti paham tertentu yang bertentangan dengan nilai-nilai nasional dan kemanusiaan, serta upaya perekrutan anggota baru dari kalangan generasi muda yang aktif di dunia maya.

Penggunaan media digital ini memperkuat potensi penyebaran radikalisme karena akses informasi yang sangat mudah dan cepat, yang kerap digunakan kelompok radikal untuk menyebarkan materi-materi radikal, meme berisi pesan kebencian, serta konten yang mengandung ajakan kekerasan. Bahkan, berbagai studi dan berita menyebutkan bahwa pelaku dan penyebar radikalisme sering memanfaatkan media sosial untuk melakukan rekrutmen, pendanaan, pelatihan, hingga koordinasi aksi kekerasan secara daring. Karena sifatnya yang tersembunyi dan mudah diakses seluruh dunia, media digital menjadi tantangan besar dalam upaya penanggulangan dan pencegahan radikalisme

Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan berbagai langkah, seperti memblokir situs-situs dan media online yang terindikasi menyebarkan paham radikal, serta mengembangkan kebijakan yang lebih preventif dengan meningkatkan literasi digital dan wawasan kebangsaan masyarakat, terutama generasi muda. Upaya ini diharapkan dapat membangun ketahanan ideologis dan meningkatkan kemampuan mereka dalam melakukan identifikasi konten radikal yang beredar di dunia maya. Peningkatan literasi digital dinilai sebagai kunci utama agar masyarakat mampu menolak segala bentuk konten intoleran dan ekstrimis, sekaligus memperkuat sikap toleransi dan moderasi beragama.

Selain itu, berbagai lembaga dan organisasi masyarakat juga aktif mengkampanyekan pentingnya literasi digital dan empati sebagai langkah efektif untuk melawan paham radikal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program pendidikan yang menanamkan nilai-nilai Pancasila, toleransi, dan kebangsaan sejak dini, termasuk di lingkungan pesantren dan komunitas lokal. Pendekatan ini diharapkan dapat membendung arus radikalisme yang sering menyusup melalui media daring, serta membangun karakter kebangsaan yang kuat di kalangan generasi Z yang aktif di dunia maya.

Secara keseluruhan, strategi utama dalam memerangi radikalisme digital di Indonesia meliputi penguatan literasi digital, kolaborasi lintas lembaga, pengawasan konten daring, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk aktif melaporkan konten radikal. Keberhasilan dari langkah-langkah ini sangat

bergantung pada kerja sama yang efektif antara pemerintah, masyarakat, keluarga, dan dunia pendidikan guna menjaga generasi muda dari pengaruh destruktif paham radikal di era digital ini

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Tya Nur Ramadani, Widya Nur Hidayah, & Elok Salmah Nasicha. (2025). Peran Kewarganegaraan Digital dalam Perspektif Hukum Islam bagi Muslim di Dunia Maya. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 134-144. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i2.742>
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Kholifaturrahmah, S., Rahmawati, A., & Fauziyyah, A. A. (2024). Peran Pancasila dalam Menangani Konflik Hukum Perkawinan antara Hukum Islam dan Hukum Nasional. *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1)
- Arianti, A., Salsabilla, E., Adhim, M. F., Hendri, N. A. W., Fitri, N. A., Febriani, S., & Hudi, I. (2024). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mencegah Radikalisme di Kalangan Remaja Gen Z. *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Matematika*, 1(3), 226-232. <https://doi.org/10.62383/katalis.v1i3.592>
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Jannah, H. M., Fatimah, V., & Fadilah, N. (2025). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Islam: Integrasi Nilai-Nilai Syariah dalam Kurikulum Pendidikan. *Jurnal Aktivisme Pendidikan*, 2(2). DOI: 10.62383/aktivisme.v2i2.889
- Ashfiya Nur Atqiya, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Salma Nabila, Mukhamad Diki Indarto, & Tri Wulan Sari. (2024). Kewarganegaraan dan Sistem Pendidikan: Pengaruh Globalisasi Terhadap Kurikulum Kewarganegaraan di Sekolah Indonesia. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(4), 208-220. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1589>
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., & Wisnu, A. R. (2022). Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan: Kajian Peran Nilai-Nilai Pancasila dalam Pendidikan Kebangsaan. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 34-50.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., & Widiya, A. A. (2024). Peran Pancasila sebagai Pedoman Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam Dinamika Sejarah dan Perkembangannya. *Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, 2(4), 379-395. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i4.1379>
- Karomah, S. (n.d.). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengembangkan Karakter Mahasiswa Di Era Digital (Studi Kasus Mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia Semester 2 TA The Role of Citizenship Education in Developing Student Character in the Digital Era (Case Study of Indonesian Language Education Students, Semester 2, Academic Year 2025/2026). *JURIP*, 4(1), 47-58. <https://doi.org/10.58222/jurip.v4i1.1425>

- Julianti, W., Nurfadhilla, I., Giftiani, Y., Metra, A. P., & Hudi, I. (2025). *Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia Melalui Demokrasi dan HAM di Era Modern*. Jurnal Inovatif, 11(1), 31-40.
- Sapto Purnomo, Septha Suseka, Romulda Galio. (2025). *Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Menanamkan Nilai Pendidikan Anti Korupsi pada Siswa Kelas X*. JURNAL PEKAN, 10(1). DOI: 10.31932/jpk.v10i1.4707
- Emilia Dewiati Pelipa, Anna Marganingsih, Efprosina Efendi. (2025). *Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Sintang Tahun 2011-2020*. JURNAL PEKAN, 10(1). DOI: 10.31932/jpk.v10i1.471
- Prisko Yanuarius.D Pare, Afrianus Gelu. (2025). *Mahasiswa sebagai Kader Bela Negara dan Pencegahan Kekerasan di Kampus*. JURNAL PEKAN, 10(1)
- Wibowo, A., & Hadingrat, R. (2023). *Media Sosial dan Radikalisme di Indonesia: Studi Penanggulangan dan Regulasi*.
- Wijaya, R. M. F. F. (2025). *Digital Multicultural Da'wah and the Prevention of Virtual Radicalism Among Generation Z*. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial.
- Yanuarti, E., Karolina, A., & Purnama Sari, D. (2019). PERAN PEMERINTAH DALAM MENCEGAH TINDAKAN RADIKALISME MELALUI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN PREVENTING RADICALISM ACTIONS THROUGH MULTICULTURAL EDUCATION. In *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam* (Vol. 5, Issue 2).
- Usman Betawi, Ahmat. (2025). *Kesenjangan Hukum Dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia: Analisis Terhadap Ancaman Siber dan Radikalisasi Online*. Istishlah: Jurnal Hukum Islam, 3(1), 46-5
- UNESCO. (2021). *Youth and Radicalization in the Digital Era: Strategies for Prevention*. Paris: UNESCO Publishing. (Laporan global tentang pencegahan radikalisme siber pada Gen Z).
- Abraham, S., Budi, R., & Cahyani, D. (2022). *Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk karakter bangsa*. Jakarta: Pustaka Nusantara
- Hidayat, A., Fitriani, L., & Wahyudi, S. (2025). *Pengaruh algoritma media sosial terhadap penyebaran radikalisme digital*. Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, 11(2), 78-95. Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). *Moderasi beragama dan indikatornya*. Jakarta: Kemenag RI.
- Rustandi, E., Sutanto, T., & Hasanah, N. (n.d.). *Pendidikan moderasi beragama di pesantren dan dampaknya terhadap nasionalisme*. Jurnal Studi Keislaman, 9(1), 45-60.
- Satria, M., Nugroho, Y., & Kartika, P. (2023). *Implementasi nilai Pancasila dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di era digital*.
- Kemendikbud RI. (2022). *Kurikulum Merdeka: Integrasi Literasi Digital untuk Pencegahan Ekstremisme*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan

- Kebudayaan. (Referensi kebijakan nasional Indonesia terkait pendidikan anti-radikalisme.)
- Hidayat, C., Effendi, I., & Zarkasyi, F. I. (2025). *Pembentukan Literasi Digital Gen Z Berbasis Nilai Kearifan Lokal dalam Membendung Konten Propaganda Terorisme Siber*. Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, 7(1), 1-14.
- Anfa, A. (2023). Pancasila di Era Digital: Tantangan dan Peluang bagi Gen Z dalam Menanamkan Nilai Kebangsaan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 11(1).
- Shafa, L. I. (2025). Analisis Resepsi Generasi Z terhadap Film dan Media Digital dalam Mencegah Penyebaran Ideologi Radikal. *CJIK: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2).
- McCully, A. (2018). *Citizenship Education in a Divided Society: Lessons for Preventing Online Radicalism*. *British Journal of Educational Studies*, 66(3), 345-362. (Analisis kritis tentang pendidikan kewarganegaraan di era digital.)